



RENCANA KERJA TAHUN 2025

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambaha Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 26);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Pasal 2

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

BAB I.	Pendahuluan;
BAB II.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
BAB III.	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
BAB IV.	Rencana Kerja dan Pendanaan;
BAB V.	Penutup.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- t. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- u. Dinas Pariwisata;
- v. Dinas Perkebunan;
- w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- x. Dinas Kehutanan;
- y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUFARMI

NIP. 19690312 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 telah diselaraskan dengan perkembangan dinamika internal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta kebijakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, merupakan telaahan bagi tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Diharapkan ke depannya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat mereposisi dan merevitalisasi diri, serta menentukan berbagai kebijaksanaan dan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam meningkatkan eksistensi dan perannya bagi kemajuan Kalimantan Timur khususnya di bidang riset dan inovasi.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak, baik pihak aparaturnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun kalangan internal Balitbangda yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Semoga Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pengembangan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025.

Samarinda, Juli 2024

Kepala



Dr. M. H. FITRIANSYAH, S.T., M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 19731127 200604 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 2019-2023.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim	19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	46
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah Tahun 2025	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	50
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	65
BAB V PENUTUP	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (2019-2023)	5
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Balitbangda Prov. Kaltim	7
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Balitbangda Prov. Kaltim	20
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	23
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi/Kabupaten/Kota	38
Tabel 3.1	Telaahan kebijakan dari RPJPN Tahun 2005-2025, RPJPD 2005-2025, RPD Tahun 2024- 2026 dan RKPD Tahun 2025	47
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Urusan Penelitian dan Pengembangan	51
Tabel 3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025	53
Tabel 4.1	Rencana Kerja Dan Pendanaan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2025	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan segala potensi, permasalahan dan tantangan yang ada. Peran strategis perencanaan ini diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Lebih lanjut secara lebih terperinci, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dokumen Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja dan kebutuhan pendanaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Renja telah melalui proses sinkronisasi atau penyelarasan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai bentuk implementasi Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi satu kesatuan. Renja Perangkat Daerah merupakan instrumen dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah.

Renja Perangkat Daerah memuat kondisi ideal yang seharusnya diciptakan

dengan disertai penjabaran mengenai cara pencapaiannya. Dengan demikian, substansi yang dimuat dalam Renja Perangkat Daerah dapat memberikan gambaran konkret terkait pengukuran target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Kesenambungan dan keselarasan antara program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, menjadi tolok ukur dan menjadi tantangan pelaksanaan pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2025.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki andil dalam ketercapaian sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur wajib untuk menyusun dokumen Renja Tahun 2025. Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim;
8. Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di daerah.
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2024 tentang Renja PD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun dengan maksud menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan menyusun RKA dan DPA Tahun 2025 yang mengacu pada RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2025 tersebut adalah tersusunnya dokumen rencana program dan kegiatan terkait kegiatan yang difokuskan pada pengembangan riset dan inovasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, yakni :

BAB I PENDAHULUAN :

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN dan SASARAN :

Memuat tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah, Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN :

Memuat tentang rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif pendanaan.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (2019-2023)

Evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan pada pelaksanaan Renja Tahun 2023 berdasarkan pada realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023. Secara garis besar capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	%	100	66,67	66,67
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Balitbangda	Indeks	88	90	102

Sumber Data : Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Balitbangda Prov. Kaltim

Pencapaian kinerja melalui tolok ukur “Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan Ibu Kota Negara (IKN)” belum mencapai target, namun Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Balitbangda telah melampaui target. Adapun pemanfaatan hasil kelitbangan yang dimaksud dalam bentuk uraian berikut :

1. Hasil rekomendasi kelitbangan yang menjadi kebijakan pemerintah daerah yang dimanfaatkan oleh stakeholder.
2. Hasil kelitbangan yang menjadi bahan referensi dalam penyusunan program dan kegiatan instansi pusat/daerah melalui aplikasi IRIS.
3. Disitasi Hasil Riset/Kajian Peneliti Balitbangda Dalam Jurnal Riset Pembangunan Balitbangda Prov. Kaltim.
4. Policy Brief sebagai bentuk naskah kebijakan dari rekomendasi hasil kelitbangan.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh optimalisasi pemanfaatan hasil

kelitbangan melalui aplikasi IRIS (*Innovation and Research Information System*) dan Jurnal Riset Pembangunan Daerah.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja tersebut didukung oleh pencapaian target program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana rincian pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra
Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2021-2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perang kat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realis asi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	07	01	07	Urusan Penunjang pemerintahan daerah										
			01	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dihasilkan Untuk Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat	%	100	59	100	102	102	N/A	N/A	N/A
					Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dihasilkan Untuk Mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	%	100	73	100	182	182	N/A	N/A	N/A
					Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	72	72	100
					Persentase Hasil Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	66	66	100
07	01	08		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%	100	100	100	100	100	2	2	100
			02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	2	1	-	-	-	1	1	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perang kat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realis asi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
07	01	09		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	3	1	4	4	100	1	1	100
			01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	3	1	1	1	100	1	1	100
			02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	5	1	2	2	100	1	1	100
07	01	10		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	4	1	3	3	100	2	2	100
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan usaha Milik Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen data kelitbangan dan peraturan yang dikelola	Dokumen	1		1	1	100	1	1	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perang kat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realis asi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Peru,usan Rekomendasi atas rencana Pendanaan penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	-	-	-	-	-	4	4	100
			01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	%	100	100	100	100	100	2	2	100
				Penelitian dan Pengembangan Bidang aspek-aspek sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang aspek-aspek sosial	Dokumen						1	1	100
07	01	23		Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	3	1	4	4	100	1	1	100
				Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	4	2	2	2	100	1	1	100
				Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
				Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen		-	-	-	-	1	1	100
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitan dan Pengembangan Ekonomi dan Permbangunan	%	100	100	100	100	100	2	2	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perang kat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realis asi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			02	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	1	2	2	100	1	1	100
				Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	1	2	2	100	1	1	100
				Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	1	1	-	-	-	-	-	100
07	01	48		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	-	1	1	100	1	1	100
				Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
				Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	1	-	7	7	100	6	6	100
				Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perang kat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realis asi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penelitian dan Pengembangan kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan kehutanan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
				Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
				Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	-	-	2	2	100	1	1	100
				Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
				Penelitian dan Pengembangam Penataan Ruang dan Pertahanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	-	-	3	3	100	1	1	100
				Penelitian dan Pengembangam Komunikasi dan informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	-	-	3	3	100	1	1	100
07	01	47		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%	100	100	100	100	100	11	11	100
			01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Inovasi dan Teknologi	Dokumen	6	4	5	5	100	2	2	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	-	2	2	100	2	2	100
				Diseminasi Jenis, Prosedur, dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	-	4	4	100	3	3	100
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan		-	3	3	100	3	3	100
				Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Kekayaan Hasil Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Laporan	1	-	1	1	100	1	1	100
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan publik pada tugas Balitbangda	%	98	97	98	98	100			100
				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang direalisasikan tepat waktu	Dokumen	62	31	31	31	100	80	80	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	10	10	10	100	11	11	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Renja Perang kat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realis asi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan	Laporan	42	21	24	24	100	21	21	100
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	5	5	100
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	28	14	14	14	100	0.18	0.18	100
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/bulan	28	14	46	46	100	45	45	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
						Target Renja Perang kat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realis asi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			ASN								
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	-	-	-	12	12	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	-	-	-	1	1	100
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	-	-	-	1	1	100
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaandan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	-	-	-	-	1	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	-	-	-	30	30	100
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	%	-	-	-	-	20	20	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja Perang kat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realis asi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	1	1	100
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	1	1	100
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	12	12	100
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	12	12	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	20	10	20	40	40	100
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pegawai	20	10	25	25	25	100
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	-	2	2	100
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	-	1	1	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1					2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	-	30	30	100	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	Bulan	24	12	12	12	100	75	75	100	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	54	27	1	1	100	1	1	100	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Paket	8		1	1	100	1	1	100	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Paket	39	12	1	1	100	1	1	100	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen penyediaan barang cetak dan penggandaan	Paket	24	12	1	1	100	1	1	100	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Laporan	358	N/A	12	12	100	12	12	100	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	-	1	1	100	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	-	-	-	1	1	100	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1	100	

				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	2	2	100
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	Unit	58	N/A	58	45	77,59	30	30	100
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	3	3	100	1	1	100
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	Paket	37	N/A	2	2	100	1	1	100
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	Unit	16	N/A	30	30	100	1	1	100
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Unit	3	N/A	12	12	100	1	1	100
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	1	1	100
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	5	5	100
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	1	1	100
				Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	Bulan	24	12	12	12	100	100	100	100
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	Laporan	200	100	12	12	100	12	12	100
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, air, dan Listrik yang disediakan	Laporan	24	12	12	12	100	12	12	100

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Yang Disediakan	Laporan	74	38	31	31	100	13	13	100
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	-	-	-	12	12	100
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah	Kegiatan	10	5	5	5	100	60	60	100
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	27	6	6	100	2	2	100
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	50	25	-	-	-	6	6	100
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	unit	51	50	61	61	100	70	70	100
				Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	Unit	2	2	2	2	100	2	2	100
				Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	unit	52		1	1	100	1	1	100
				Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	100	1	1	100
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	1	1	100

Keterangan :

- Terdapat beberapa target dan realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang semula dialokasikan pada Tahun 2022, di Tahun 2023 tidak dilaksanakan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program pada Renja BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja dengan capaian sebagai berikut :

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Hasil Kelitbangan Yang Dihasilkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat”, terealisasi sebesar 66,67% dari target 100%. Capaian program ini belum mencapai target karena masih banyaknya hasil riset yang memerlukan riset lanjutan.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Pelayanan Publik Pada Tugas Balitbangda”, telah melampaui target dari 88% mencapai 90%. Program terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan. Terdapat sub kegiatan yang belum mencapai target yakni Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dari target 100% hanya tercapai 77,59%, karena adanya pergeseran anggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah adalah kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dengan target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya di dalam dokumen Renstra 2019-2023 dan Renja Tahun 2023.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Balitbangda Prov. Kaltim

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Prangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (Riset/ Inovasi)	Tahun 2025 (Riset/ Inovasi)	Tahun 2026 (Riset/ Inovasi)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (Riset/ Inovasi)	Tahun 2025 (Riset/ Inovasi)	Tahun 2026 (Riset/ Inovasi)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Presentasi Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Mendukung Ibu Kota Negara			100	-	-	-	66,67	-	-	-	Bahwa realisasi dan capaian kinerja program tahun 2023 tidak dapat dijadikan tolak ukur realisasi dan capaian tahun 2024-2026 (dan sebaliknya) karena adanya perbedaan uraian dan target kinerja. Tahun 2023 lebih mengutamakan pemanfaatan hasil litbang untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang mendukung IKN, sedangkan tahun 2024-2026 realisasi dan capaian kinerja program diperuntukkan sebagai tolak ukur dari pemanfaatan riset dan inovasi yang mendukung prioritas pembangunan RPD Prov. Kaltim tahun 2024-2026 yang ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah
2	Jumlah Hasil Riset yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah			-	2	5	10	-	2	5	10	
3	Jumlah Hasil Inovasi yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah			-	2	5	10	-	2	5	10	

Berdasarkan capaian analisis pada tabel di atas, bahwa kinerja pelayanan riset dan inovasi masih perlu ditingkatkan kedepannya. Capaian kinerja Balitbangda Prov. Kaltim pada tahun 2023 belum mencapai target dan diharapkan pada tahun 2024-2026 dapat menghasilkan riset dan inovasi yang dapat dinilai/dievaluasi masuk kategori aplikatif sehingga dapat dilaksanakan oleh stakeholder terutama Masyarakat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis Balitbangda Provinsi Kaltim

- a. Permasalahan dan Hambatan (yang di dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan Dampaknya Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah).

Berdasarkan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) dan Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, ditemui beberapa faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran strategi faktor pendorong dan penghambat dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong
 - a. Komitmen dan Kerjasama pengembangan Riset dan Inovasi Daerah.
 - b. Komitmen untuk mengembangkan produk riset dan Inovasi yang lebih aplikatif.
 - c. Komitmen untuk mengembangkan produk-produk riset dan inovasi yang ditujukan untuk penyelesaian permasalahan Pembangunan.
2. Faktor Penghambat
 - a. Belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil kelitbangan.
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang Inovasi dan Teknologi
 - c. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Riset dan Pengembangan inovasi.
 - d. Skema pendanaan riset dan pengembangan inovasi yang belum memadai.
- 3 Tindaklanjut
 - a. Membuat Regulasi yang dapat mengelola Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi (litbangjirap inovek) bagi Perangkat Daerah dan pihak berkepentingan lainnya, serta Merencanakan dan mengembangkan capaian Outcome, Benefit, Impact (OBI) dari Riset dan Inovasi yang lebih Implementatif untuk Penyelesaian Permasalahan Pembangunan melalui 4 (empat) aspek: Science, Policy, Social & Industry.
 - b. Pengalokasian anggaran yang mendukung sarana dan prasarana penunjang Inovasi dan Teknologi

- c. Peningkatan kapasitas SDM internal dan penguatan Komitmen Tidak Lanjut hasil pengukuran kinerja individu dan organisasi, melalui Evaluasi Akuntabilitas Capaian Kinerja Internal secara berkala dan berjenjang, serta pemberian reward and punishment kepada unit kerja/pegawai.
 - d. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja organisasi. Utamanya adalah penyusunan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK (amanat Peraturan BRIN No. 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah) sebagai pedoman arah kebijakan kelitbangan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta menyelaraskannya dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah (RPJPD/RPJMD/RPD). Tantangan dan Peluang (Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah).
4. Isu-isu Penting (Formulasi Isu-Isu Berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025.
- a. Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat
bahwa pendayagunaan hasil riset harus berorientasi tepat guna dan bersifat aplikatif sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan stakeholder.
 - b. Peningkatan Pengembangan Inovasi Daerah
bahwa pengembangan inovasi daerah memiliki peran dalam mengoptimalkan potensi daerah dengan menciptakan keunggulan daya saing yang berkelanjutan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2025, dapat dijelaskan pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Inikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Inikatif
5 05 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84 Indeks	23.982.325.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Samarinda	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	23.982.325.000
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100%			Samarinda	Nilai SAKIP Balitbangda	77,50 (BB)	
5 05 1 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85%	390.663.561	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	85%	390.663.561
5 05 1 1.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	298.488.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	298.488.000
5 05 1 1.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.129.552	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.129.552
5 05 1 1.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.129.552	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.129.552

5	05	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.539.358	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.539.358
5	05	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.539.358	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.539.358
5	05	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	62.029.741	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	62.029.741
5	05	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	6.808.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	6.808.000
5	05	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0,08%	13.281.487.498	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0,08%	13.281.487.498
5	05	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	12.975.725.716	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	12.975.725.716
5	05	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	242.040.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	242.040.000

5	05	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	3.799.950	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	3.799.950
5	05	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	50.999.203	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	50.999.203
5	05	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.899.100	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.899.100
5	05	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	5.023.529	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	5.023.529
5	05	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	15%	33.910.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	15%	33.910.000
5	05	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.600.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.600.000
5	05	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.600.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.600.000
5	05	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-

5	05	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	26.110.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	26.110.000
5	05	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.600.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.600.000
5	05	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	50%	441.900.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Wilayah Kaltim	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	50%	441.900.000
5	05	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	70.720.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dalam dan Luar Wilayah Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	70.720.000
5	05	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	11.180.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	11.180.000
5	05	1	1.05	6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Wilayah Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	180.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	180.000.000
5	05	1	1.05	7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Wilayah Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang/Bulan	180.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang/Bulan	180.000.000
5	05	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan umum berbasis elektronik	85%	3.619.158.437	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase pelayanan umum berbasis elektronik	85%	3.619.158.437

5	05	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.528.741	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.528.741
5	05	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.026.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.026.800
5	05	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	1 Paket	58.024.876	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	1 Paket	58.024.876
5	05	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	101.863.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dalam dan Luar Wilayah Kaltim	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	101.863.500
5	05	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	118.866.520	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	118.866.520
5	05	1	1.06	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000
5	05	1	1.06	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Wilayah Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3.088.048.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	3.088.048.000
5	05	1	1.06	8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	31.400.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	31.400.000
5	05	1	1.06	9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	25.400.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	25.400.000

5	05	1	1.07		kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	70%	2.913.387.401	kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	70%	2.913.387.401
5	05	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	
5	05	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	79.754.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	79.754.000
5	05	1	1.07	3	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	29.796.480	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	29.796.480
5	05	1	1.07	4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	949.636.921	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	949.636.921
5	05	1	1.07	5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.854.200.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.854.200.000
5	05	1	1.07	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-
5	05	1	1.07	7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-

5	05	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100%	2.419.445.105	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100%	2.419.445.105
5	05	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.756.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.756.200
5	05	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	495.531.705	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	495.531.705
5	05	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	390.412.800	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	390.412.800
5	05	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	1.504.744.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	1.504.744.400
5	05	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	70%	882.372.998	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	70%	882.372.998
5	05	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	152.087.998	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	152.087.998
5	05	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	198.655.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	198.655.000

5	05	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	43.240.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	43.240.000
5	05	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	17.760.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	17.760.000
5	05	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	363.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	363.000.000
5	05	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	10.150.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	10.150.000
5	05	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	97.480.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	97.480.000
5	05	2			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	72%	10.767.675.000	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	9%	10.767.675.000
5	05						Persentase Hasil Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	66%				Persentase Hasil Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	9%	
5	05	2	1.01		Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan		Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4%	1.834.950.000	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan		Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4%	1.834.950.000

5	05	2	1.01	1	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	400.000.000	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	400.000.000
5	05	2	1.01	2	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	350.000.000	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	350.000.000
5	05	2	1.01	3	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	-	-	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	-	-
5	05	2	1.01	4	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	200.000.000	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	200.000.000
5	05	2	1.01	5	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Reformasi Birokrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Reformasi Birokrasi	1 Laporan	200.000.000	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Reformasi Birokrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Reformasi Birokrasi	1 Laporan	200.000.000
5	05	2	1.01	6	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	-	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	-

5	05	2	1.01	7	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	-	-	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	-	-
5	05	2	1.01	8	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	-	-	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	-	-
5	05	2	1.01	9	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	-	-	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	-	-
5	05	2	1.01	10	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	-	-	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	-	-
5	05	2	1.01	11	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	300.000.000	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	300.000.000
5	05	2	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	184.950.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	184.950.000
5	05	2	1.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	200.000.000	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	200.000.000

5	05	2	1.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	-	-	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	-	-
5	05	2	1.01	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	-	-	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	-	-
5	05	2	1.02		Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan		Proposi / Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4%	2.150.000.000	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Proposi / Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4%	2.150.000.000
5	05	2	1.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	450.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	450.000.000
5	05	2	1.02	2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	400.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	400.000.000
5	05	2	1.02	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dokumen	400.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dokumen	400.000.000
5	05	2	1.02	4	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	-	-	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	-	-
5	05	2	1.02	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	-	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	-

5	05	2	1.02	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	300.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	300.000.000
5	05	2	1.02	7	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-
5	05	2	1.02	8	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
5	05	2	1.02	9	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	350.000.000	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	350.000.000
5	05	2	1.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	250.000.000	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	250.000.000
5	05	2	1.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	-	-	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	-	-
5	05	2	1.03		Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan		Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4%	3.792.500.000	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	4%	3.792.500.000
5	05	2	1.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	310.000.000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	310.000.000
5	05	2	1.03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	310.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	310.000.000

5	05	2	1.03	3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	170.000.000	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	170.000.000
5	05	2	1.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	340.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	340.000.000
5	05	2	1.03	5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	320.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	320.000.000
5	05	2	1.03	6	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	320.000.000	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	320.000.000
5	05	2	1.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	310.000.000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	310.000.000
5	05	2	1.03	8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	282.500.000	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	282.500.000
5	05	2	1.03	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	320.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	320.000.000
5	05	2	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	320.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	320.000.000
5	05	2	1.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	320.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	320.000.000

5	05	2	1.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	320.000.000	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	320.000.000	
5	05	2	1.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	150.000.000	
5	05	2	1.04		Kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11%	2.990.225.000	Kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11%	2.990.225.000	
5	05	2	1.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	1.139.987.070	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	1.139.987.070	
5	05	2	1.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	199.980.648	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	199.980.648	
5	05	2	1.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	1.199.994.803	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	1.199.994.803	
5	05	2	1.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	299.998.534	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	299.998.534	
5	05	2	1.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	150.263.945	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	150.263.945	
									34.750.000.000						34.750.000.000

Dari hasil review yang disajikan dalam Tabel 2.4 diatas, terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan terhadap Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Perubahan indikator pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang semula Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti, menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP Balitbangda, dalam rangka memberikan dukungan terhadap indikator pencapaian sasaran strategis Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan Balitbangda.
2. Perubahan target indikator pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang semula Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran sebesar 72% menjadi 9%, Persentase Hasil Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran yang semula 66% menjadi 9%.
3. Rasionalisasi pada Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, dari 15 (lima belas) sub kegiatan menjadi 7 (tujuh).
4. Rasionalisasi pada Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, dari 11 (sebelas) sub kegiatan menjadi 6 (enam).
5. Rasionalisasi pada Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, dari 13 (tiga belas) sub kegiatan menjadi 12 (dua belas).
6. Sub kegiatan pembinaan. pengawasan. dan pengendalian barang milik daerah pada skpd tidak dilaksanakan pada tahun 2025 untuk rasionalisasi anggaran.
7. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tidak dilaksanakan di tahun 2025 untuk rasionalisasi anggaran.
8. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak dilaksanakan di tahun 2025 untuk rasionalisasi anggaran.
9. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak dilaksanakan di tahun 2025.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 diakomodir dalam Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Rencana Induk Kelitbangan. Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 membahas tentang rencana program dan kegiatan Tahun 2025, sedangkan Rencana Induk Kelitbangan dimaksud adalah dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pemantapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Melalui Rinduk kelitbangan diharapkan mampu mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Adapun program dan kegiatan tersebut diakomodir dalam prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan usulan-usulan riset dan kajian dari lembaga dan perorangan yang diakomodir dalam aplikasi IRIS (Inovation Research Information System).

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					
1	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Laboratorium Farmaka Tropis fakultas Farmasi Universitas Mulawarman	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Riset kali ini merupakan bagian dari bidang prioritas berdasarkan Rencana Induk Riset Nasional yakni Fokus Riset Kesehatan dan Obat dengan tema Kemandirian Bahan baku obat dengan dengan topik pengembangan fitofarmaka berbasis sumber daya lokal.
2	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	KST-BJ Habibie, Gedung 480, Serpong-Banten (https://maps.app.goo.gl/MicKgnqjjomGDJKx7)	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Penanganan sampah dengan pengelolaan menggunakan manajemen yang tepat permasalahan sampah yakin bisa diatasi dalam jangka beberapa tahun kedepan khususnya di provinsi Kalimantan Timur.
3	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Samarinda	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Organisasi Perangkat Daerah tidak bisa menentukan persentase realisasi fisik dari suatu kegiatan, sehingga kolom persentase realisasi fisik pada pelaporan diisi dengan angka persen yang tidak ada dasar pengisian.

4	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Lokasi yang dipilih dalam Riset ini mencakup daerah Kota Samarinda, daerah IKN (sepaku dan sekitarnya) dan beberapa daerah di Kalimantan Timur lainnya seperti Berau, Tenggarong, Kutai Lama, dan lainnya	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota, ersentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur sangat berpengaruh di segala aspek. Posisi Kalimantan di kawasan timur tengah Indonesia diharapkan menjadi Pusat Gravitasi bagi pembangunan dan perekonomian yang sustainable dengan harapan pemanfaatan potensi dapat dilakukan secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, Kalimantan khususnya Kalimantan Timur harus siap dalam segala hal menerima keberadaan IKN
5	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Kampung Melati Jaya Kec. Gunung Tabur	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Melihat besarnya potensi sumberdaya alam berupa lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh Kabupaten Berau khususnya Desa Melati Jaya Kecamatan Gunung Tabur, sehingga sangat penting dilaksanakan kegiatan inventarisasi data Pertanian, Perkebunan dan Pangan Kabupaten Berau untuk mendukung pelaksanaan penelitian di bidang tersebut
6	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Samarinda	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Potensi Sumber Daya Alam Kota Samarinda 2. Mitigasi Dampak Geologis kota Samarinda (peta rawan bencana) kota Samarinda.
7	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Samarinda, Balikpapan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Trend penjualan bioproduk herbal meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan pemasaran secara online dengan jangkauan yang hingga mencapai antar pulau.
8	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Samarinda	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	erembangan transportasi darat yang pesat menyebabkan meningkatnya jumlah mobil, sebagai salah satu alat transportasi darat yang vital.

9	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	KPHL Balikpapan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
10	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Lokasi kegiatan di wilayah HLSM dan DAS Manggar secara umum dalam wilayah kerja UPTD KPHL Balikpapan Unit XXX Sungai Wain–Manggar Provinsi Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Permasalahan di wilayah HLSM ditambah lagi dengan pembukaan jalan bebas hambatan (Tol) yang membelah kawasan HLSM dari Kota Balikpapan menuju Samarinda dan ditetapkan wilayah Penajam Paser Utara (PPU) – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) oleh pemerintah pusat yang sebagian wilayahnya menjadi Ibukota Nusantara (IKN) bahkan sebagian wilayah DAS HLSM masuk dalam wilayah IKN
11	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Di 6 kabupaten/kota yaitu: 1). Kabupaten Berau; 2). Kabupaten Kutai Barat; 3). Kabupaten Kutai Kartanegara; 4). Kabupaten Kutai Timur; 5). Kabupaten Paser; 6). Kota Balikpapan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	kajian ini dalam mengevaluasi perkembangan kemajuan pelaksanaan Hutsos di Kaltim.
12	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	DAS Sungai Karang Asam Besar Kota Samarinda	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	manajemen Banjir Pada DAS Sungai Karang Asam Besar Kota Samarinda
13	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Kabupaten Kukar dan PPU	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	upaya untuk memberdayakan warga setempat agar tidak tergusur oleh para pendatang. Ekowisata dapat digunakan untuk mencegah dampak negatif pembangunan IKN terhadap masyarakat lokal karena secara prinsip ekowisata akan melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan suatu kawasan wisata.

14	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Samarinda, Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Stunting adalah kasus yang saat ini menjadi perhatian dunia khususnya di Indonesia. Kekurangan asupan gizi jangka panjang ditambah kasus penyakit yang sering terjadi pada masyarakat menyebabkan kasus stunting menjadi meningkat. Kondisi ini memerlukan pemecahan masalah agar kasus stunting tidak menjadi berkembang dan semakin meningkat.
15	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Wilayah pertambangan batubara dan perkebunan sawit korporasi di Kalimantan Timur.	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Identifikasi model-model respon/adaptasi yang ditemukan oleh riset dapat menjadi landasan penyusunan program berbasis budaya dan sumberdaya lokal, yang menunjung ekonomi hijau dan berkelanjutan.
16	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Analisa Potensi Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Kalimantan Timur" Kalimantan Timur sebagai Provinsi yang menjadi hinterland wilayah Badan Otorita IKN Nusantara memerlukan analisa potensi program ketahanan pangan pada seluruh wilayah Kabupaten / Kota yang memerlukan distribusi pasokan pangan secara berkelanjutan.
17	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Peran perempuan anak lansia dan disabilitas dalam penyerapan tenaga kerja (RISET)
18	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Visual Asistif untuk Tunanetra berbasis Object-to-Audio dengan metode Transfer Learning (INOVASI)
19	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Evaluasi kebijakan beasiswa kaltim tuntas terhadap penyerapan tenaga kerja (NASKAH KEBIJAKAN)

20	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Kebutuhan Dunia Usaha terhadap dunia kerja di provinsi kalimantan timur (RISET)
21	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Model rekayasa sosial terhadap SDM kaltim yang berdaya saing (RISET)
22	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	strategi Pelestarian budaya berbasis komunitas di kalimantan timur (RISET)
23	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	strategi Pelestarian budaya berbasis komunitas di kalimantan timur untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat (RISET)
24	Kegiatan Inovasi dan Pengembangan Teknologi	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang inovasi dan teknologi yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Inovasi Pembelajaran Virtual (INOVASI)
25	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pernikahan Dini dan Permasalahan Remaja penyebab stunting (NASKAH KEBIJAKAN)

26	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Kajian Presepsi permasalahan stunting (kapsul stunting) pada masyarakat di kalimantan timur (RISET)
27	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	strategi percepatan Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan masyarakat di kalimantan timur (NASKAH KEBIJAKAN)
28	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Analisis <i>supply chain</i> sektor perikanan di provinsi kalimantan timur (RISET)
29	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pengembangan diservikasi produk pangan olahan lokal di kalimantan timur untuk menunjang ketahanan pangan berkelanjutan (RISET)
30	Kegiatan Inovasi dan Pengembangan Teknologi	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang inovasi dan teknologi yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Penerapan prototype teknologi pertanian modern (INOVASI)
31	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Optimasi lahan kering untuk pencapaian target peningkatan produksi padi di kalimantan timur (NASKAH KEBIJAKAN)

32	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Potensi Serapan karbon untuk mendukung pengembangan kebijakan blue economy (RISET)
33	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Strategi Pengembangan dan Pemberdayaan Bumdes berkolaborasi dengan industri untuk kemandirian daerah (RISET)
34	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pemanfaatan material lokal dalam pembangunan di kaltim. (RISET)
35	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	valuasi perhitungan ongkos angkut hasil usaha tani di kalimantan timur (RISET)
36	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Strategi pengembangan kawasan pusat pertumbuhan wilayah regional kalimantan di sepanjang ALKI II. (RISET)
37	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Konsep pengembangan buffer zone (wilayah Pendukung) Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur. (RISET)

38	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Efektifitas APBD dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM). (RISET order dari P.J. Gub)
39	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Analisis Tingkat Resiko Bencana (RISET)
40	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Strategi Peningkatan Indeks LHK (RISET)
41	Kegiatan Inovasi dan Pengembangan Teknologi	Wilayah Kaltim	Persentase Hasil Riset bidang inovasi dan teknologi yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pembuatan Prototype EBT Bayu (INOVASI)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Adapun arah kebijakan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2025 berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 2005-2025, RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024- 2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024- 2026, dengan tema RKPD tahun 2025 adalah : “Optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing”. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu melakukan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi.

Adapun telaahan kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 2005-2025, RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024- 2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Telaahan kebijakan dari RPJPN Tahun 2005-2025, RPJPD 2005-2025, RPD Tahun 2024- 2026 dan RKPD Tahun 2025

RPJPD	RPJPN	RPD	RKPD
Penguatan dan Pengembangan Sistem Statistik	Pembangunan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta mengembangkan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saing bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memerhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.	Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus 2 Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus 3 Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan 4 Optimalisasi Boarding School 5 Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu 6 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 7 Peningkatan literasi dan numerasi 8 Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar	Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus 2 Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus 3 Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan 4 Optimalisasi Boarding School 5 Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu 6 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 7 Peningkatan literasi dan numerasi 8 Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar
Pengembangan dan penguatan sistem informasi statistik yang bermutu, akurat, tepat waktu, mutakhir, terbuka, terpercaya, berbasis teknologi informasi dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan; pengembangan riset dasar, ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengambilan keputusan, serta mendukung peningkatan mutu pelayanan publik	Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Di samping itu, diupayakan peningkatan kerja sama penelitian domestik dan internasional antar lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), perguruan tinggi dan dunia usaha serta penumbuhan industri baru berbasis produk litbang dengan dukungan modal ventura.	Percepatan perbaikan gizi masyarakat 2 Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi 3 Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 4 Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 5 Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen fasyankes maupun fasilitasnya 6 Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 7 Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan 8 Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Percepatan perbaikan gizi masyarakat 2 Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi 3 Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 4 Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 5 Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen fasyankes maupun fasilitasnya 6 Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 7 Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan 8 Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
Pengembangan dan penguatan pusat data dan sistem informasi geografi berbasis teknologi informasi dalam mendukung penataan ruang dan perencanaan pembangunan wilayah secara terpadu.		Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja 2 Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri 3 Penyelenggaraan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja 2 Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri 3 Penyelenggaraan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja
Peningkatan dan pengembangan sistem informasi administrasi yang andal, terpercaya, efisien dan efektif dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik.		Perluasan kesempatan kerja	Perluasan kesempatan kerja
Peningkatan jumlah dan mutu sumberdaya manusia yang mampu memanfaatkan, mengelola dan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi.		Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja

Peningkatan dan penguatan kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya sistem informasi yang andal, modern dan terpadu.		Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan 2 Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik 3 Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan	Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan 2 Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik 3 Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan
Pengembangan riset ilmu-ilmu dasar dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan.		Peningkatan Daya Saing UKM 2 Peningkatan Pemasaran Produk UKM 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Industri 4 Pengembangan Hilirisasi Komoditi Hulu Agro, Aneka dan Pangan 5 Peningkatan Kapasitas SDM yang Berdaya Saing 6 Pengembangan Destinasi Pariwisata Prov. Kaltim 7 Peningkatan Pemasaran Pariwisata Daerah 8 Peningkatan Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi Pariwisata Daerah	Peningkatan Daya Saing UKM 2 Peningkatan Pemasaran Produk UKM 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Industri 4 Pengembangan Hilirisasi Komoditi Hulu Agro, Aneka dan Pangan 5 Peningkatan Kapasitas SDM yang Berdaya Saing 6 Pengembangan Destinasi Pariwisata Prov. Kaltim 7 Peningkatan Pemasaran Pariwisata Daerah 8 Peningkatan Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi Pariwisata Daerah
Peningkatan mutu sumber daya manusia dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		Menjamin ketersediaan pangan melalui analisis dan informasi pasokan pangan yang akurat dan update 2 Meningkatkan sumber pangan dan gizi yang berkualitas melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar	Menjamin ketersediaan pangan melalui analisis dan informasi pasokan pangan yang akurat dan update 2 Meningkatkan sumber pangan dan gizi yang berkualitas melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar
Pengembangan dan penguatan lembaga penelitian dan pengembangan.		Pemetaan Rawan Pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi 2 Penyaluran bantuan pangan pada daerah rawan pangan / terdampak bencana	Pemetaan Rawan Pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi 2 Penyaluran bantuan pangan pada daerah rawan pangan / terdampak bencana
Pemanfaatan dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.		Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan yang beragam , bergizi, seimbang, aman (B2SA) berbasis pangan lokal	Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan yang beragam , bergizi, seimbang, aman (B2SA) berbasis pangan lokal
Arah Kebijakan		Revitalisasi lahan perkebunan yang tidak produktif 2 Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan 3 Memperbanyak penggunaan benih perkebunan unggul bersertifikat 4 Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Revitalisasi lahan perkebunan yang tidak produktif 2 Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan 3 Memperbanyak penggunaan benih perkebunan unggul bersertifikat 4 Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produk Perkebunan
Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.		Optimalisasi reproduksi ternak 2 Meningkatkan produksi dan produktivitas pakan ternak 3 Meningkatkan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan ternak 4 Pengembangan dan Penguatan kelembagaan peternakan	Optimalisasi reproduksi ternak 2 Meningkatkan produksi dan produktivitas pakan ternak 3 Meningkatkan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan ternak 4 Pengembangan dan Penguatan kelembagaan peternakan
Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara efektif dan efisien.		Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 2 Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan 2 Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan
Pemanfaatan hasil penelitian dalam peningkatan mutu layanan publik.		Revitalisasi lahan pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2 Memperbanyak penggunaan benih TPH unggul bersertifikat 3 Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian	Revitalisasi lahan pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2 Memperbanyak penggunaan benih TPH unggul bersertifikat 3 Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian
Pemanfaatan dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dasar sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat.		Peningkatan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	Peningkatan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu
Penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK kepada masyarakat secara mudah, murah dan tanpa hambatan.		Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar 2 Peningkatan keberfungsian sosial PMKS 3 Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan 4 Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial -361- Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 5 Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi 6 Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa 7 Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin/rentan miskin	Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar 2 Peningkatan keberfungsian sosial PMKS 3 Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan 4 Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial -361- Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 5 Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi 6 Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa 7 Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin/rentan miskin

		Pemberian bantuan sarana pertanian dan perikanan bagi masyarakat miskin terutama di daerah tertinggal dan perbatasan 2 Pelatihan dan penyuluhan pertanian dan perikanan bagi masyarakat miskin 3 Pemberian Akses Legal Pengelolaan Hutan kepada Masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan Hutan 4 Pelatihan dan stimulus permodalan untuk gabungan kelompok usaha mikro/keompok usaha bersama (KUBE) 5 Subsidi ongkos angkut pemasaran produk untuk daerah tertinggal dan perbatasan	Pemberian bantuan sarana pertanian dan perikanan bagi masyarakat miskin terutama di daerah tertinggal dan perbatasan 2 Pelatihan dan penyuluhan pertanian dan perikanan bagi masyarakat miskin 3 Pemberian Akses Legal Pengelolaan Hutan kepada Masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan Hutan 4 Pelatihan dan stimulus permodalan untuk gabungan kelompok usaha mikro/keompok usaha bersama (KUBE) 5 Subsidi ongkos angkut pemasaran produk untuk daerah tertinggal dan perbatasan
Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK dalam peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing usaha masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat pengguna		Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting 2 Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting 2 Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
Penggunaan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK dalam meningkatkan mutu dan jangkauan layanan publik		Peningkatan dan pemeliharaan pelayanan jalan provinsi 2 Pembangunan ruas jalan baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Peningkatan dan pemeliharaan pelayanan jalan provinsi 2 Pembangunan ruas jalan baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi
Pengembangan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari para pelaku usaha/industri swasta besar dan perguruan tinggi kepada masyarakat.		Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan pendayagunaan air 2 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air	Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan pendayagunaan air 2 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air
Mengalokasikan dalam bentuk insentif untuk mengembangkan motivasi masyarakat dan lembaga non litbang.		Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang 2 Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah 3 Pengimplementasian kebijakan satu peta	Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang 2 Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah 3 Pengimplementasian kebijakan satu peta
Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis IPTEK di setiap bidang pembangunan.		Pemenuhan kebutuhan infrastruktur air minum	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur air minum
Peningkatan dan Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan riset unggulan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi		Pembangunan sistem penyediaan air minum skala regional	Pembangunan sistem penyediaan air minum skala regional
Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai dalam penelitian pembangunan		Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
Peningkatan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan berbasis IPTEK terapan dengan berbagai lembaga penelitian masyarakat		Revitalisasi, penanganan, dan penyediaan infrastruktur di permukiman kumuh kewenangan provinsi	Revitalisasi, penanganan, dan penyediaan infrastruktur di permukiman kumuh kewenangan provinsi
		Peningkatan pelayanan terminal tipe B 2 Penyediaan perlengkapan keselamatan jalan	Peningkatan pelayanan terminal tipe B 2 Penyediaan perlengkapan keselamatan jalan
		Peningkatan ketersediaan jaringan tegangan rendah dan distribusi listrik	Peningkatan ketersediaan jaringan tegangan rendah dan distribusi listrik
		Menjaga kualitas lingkungan melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan 2 Menjaga kualitas lingkungan melalui penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan 3 Menjaga kualitas lingkungan melalui pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan	Menjaga kualitas lingkungan melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan 2 Menjaga kualitas lingkungan melalui penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan 3 Menjaga kualitas lingkungan melalui pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan
		Peningkatan pengelolaan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan	Peningkatan pengelolaan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan
		Peningkatan pengelolaan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan	Peningkatan pengelolaan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan
		Meningkatkan upaya pengelolaan TAHURA provinsi 2 Meningkatkan upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar 3 Optimalisasi pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat 4 Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan	Meningkatkan upaya pengelolaan TAHURA provinsi 2 Meningkatkan upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar 3 Optimalisasi pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat 4 Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan
		Optimalisasi Pengelolaan DAS terpadu multipihak 2 Optimalisasi penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan	Optimalisasi Pengelolaan DAS terpadu multipihak 2 Optimalisasi penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan
		Pemberian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat berbasis perhutanan sosial	Pemberian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat berbasis perhutanan sosial

		Percepatan pembangunan pembangkit listrik pada Desa belum berlistrik PLN dengan menggunakan energi baru terbarukan	Percepatan pembangunan pembangkit listrik pada Desa belum berlistrik PLN dengan menggunakan energi baru terbarukan
		Peningkatan penyediaan sarana pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan	Peningkatan penyediaan sarana pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan
		Penyusunan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan 2 Pelaksanaan layanan publik sesuai standar, operasional dan prosedur 3 Perbaikan budaya kerja di lingkungan pemerintahan	Penyusunan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan 2 Pelaksanaan layanan publik sesuai standar, operasional dan prosedur 3 Perbaikan budaya kerja di lingkungan pemerintahan
		Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
		Peningkatan pengelolaan eGovernment 3 Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Peningkatan pengelolaan eGovernment 3 Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
		Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan 2 Peningkatan kualitas penilaian dan evaluasi kinerja ASN	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan 2 Peningkatan kualitas penilaian dan evaluasi kinerja ASN
		Peningkatan pelatihan ASN berbasis kompetensi 2 Peningkatan sertifikasi kompetensi ASN	Peningkatan pelatihan ASN berbasis kompetensi 2 Peningkatan sertifikasi kompetensi ASN
		Peningkatan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja 2 Peningkatan kualitas perencanaan dan penjenjangan kinerja 3 Peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja 2 Peningkatan kualitas perencanaan dan penjenjangan kinerja 3 Peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja
		Peningkatan kapabilitas APiP 2 Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 3 Peningkatan pembangunan zona integritas	Peningkatan kapabilitas APiP 2 Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 3 Peningkatan pembangunan zona integritas

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2025

Sesuai dengan Tugas dan fungsi, Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, berperan dalam pencapaian seluruh tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026. Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk pencapaian Prioritas Pembangunan, Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kaltim 2024-2026.

Berdasarkan isu strategis, tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kaltim di masa yang akan datang adalah **“Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Riset Dan Inovasi Yang Optimal”** dengan tolok ukur “Jumlah Penerapan Hasil Riset yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Dan Pembangunan Daerah” dan “Jumlah Penerapan Hasil Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah”.

Tujuan tersebut tercapai jika jumlah Hasil Riset yang telah dilaksanakan telah diimplementasikan dan bernilai manfaat (yang telah digunakan) bagi masyarakat dan

pembangunan daerah dan jumlah Hasil INOVASI yang telah dilaksanakan telah diimplementasikan dan bernilai manfaat (yang telah digunakan) bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus spesifik, terukur, jelas kriterianya dan memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien. Sasaran yang ingin dicapai Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah : Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat, dengan tolok ukur “Jumlah Hasil Riset yang Diterapkan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah” dan “Jumlah Hasil Inovasi yang Diterapkan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah”. Diterapkan dalam arti bahwa Hasil RISET dan Inovasi yang dilaksanakan akan diimplementasikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Urusan Penelitian dan Pengembangan

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
			2024	2025	2026
Tujuan : Terwujudnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi yang Optimal	Jumlah penerapan hasil riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah	Riset	1	3	6
	Jumlah penerapan hasil inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah	Inovasi	1	3	6
Sasaran : Meningkatnya Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat	Jumlah hasil riset yang diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Riset	2	5	10
	Jumlah hasil riset yang diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Inovasi	2	5	10

Keterangan : Tabel tersebut merupakan tujuan dan sasaran yang mendukung urusan Balitbangda berdasarkan tugas dan fungsinya.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program dan kegiatan tahun 2025 disusun dengan memperhatikan : (1) Penyelarasan tematik riset dan inovasi dengan sasaran prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025; (2) hasil evaluasi capaian indikator kinerja Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) arah kebijakan riset dan inovasi; dan (5) regulasi yang berlaku.

Penyelarasan tematik riset dan inovasi telah diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, yang kemudian disinergikan dengan isu-isu strategis riset dan inovasi yang sedang berkembang seperti pemberdayaan potensi ekonomi, pengentasan kemiskinan, pencapaian SDGs dan pengembangan iptek.

Hasil riset dan inovasi diharapkan dapat mendukung arah kebijakan riset dan inovasi, sesuai dengan peraturan atau kebijakan riset dan inovasi yang dipedomani.

Adapun jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 telah disesuaikan dengan fokus riset dan inovasi serta berpedoman pada kesesuaian prioritas pembangunan yang ada di Rencana pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, seperti yang tersaji dalam tabel 3.3 berikut :

**Tabel 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2025**

Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Inidkatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Inidkatif
5	05	2			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran		9%	13.671.182.183			18%	10.644.350.000
						Persentase Hasil Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran		9%				18%	
5	05	2	1.01		Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota		4%	2.277.506.894			5%	1.891.170.000
5	05	2	1.01	1	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	860.519.020	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	228.500.000
5	05	2	1.01	2	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	2 Laporan	489.300.520	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	2 Laporan	228.500.000
5	05	2	1.01	3	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	-		APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	228.500.000

5	05	2	1.01	4	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	183.081.020	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	1.690.000
5	05	2	1.01	5	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Reformasi Birokrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	184.307.020	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	185.900.000
5	05	2	1.01	6	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	-	-	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	1.690.000
5	05	2	1.01	7	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	-	-	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	295.750.000
5	05	2	1.01	8	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	-	-	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	1.690.000
5	05	2	1.01	9	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	-	-	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	1.690.000

05	2	1.01	10	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	-	-	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	1.690.000
05	2	1.01	11	Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi. Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	245.229.020	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	397.500.000
05	2	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	105.153.274	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	1.690.000
05	2	1.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	5 Rekomendasi	209.917.020	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Rekomendasi	313.000.000
05	2	1.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	-	-	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	1.690.000
05	2	1.01	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	-	-	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Rekomendasi	1.690.000

5	05	2	1.02		Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Proposi / Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota		4%	1.616.369.770			5%	1.932.980.000
5	05	2	1.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	317.772.120	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	499.250.000
5	05	2	1.02	2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	266.688.000	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	314.690.000
5	05	2	1.02	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	2 Dokumen	284.436.000	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	433.900.000
5	05	2	1.02	4	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	-	-	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	1.690.000
5	05	2	1.02	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	-	-	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	1.690.000
5	05	2	1.02	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	253.170.000	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	290.250.000
5	05	2	1.02	7	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	-	-	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	1.690.000
5	05	2	1.02	8	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	-	-	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	1.690.000

5	05	2	1.02	9	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	257.787.650	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	384.750.000
5	05	2	1.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	236.516.000	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	1.690.000
5	05	2	1.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	-		APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	1.690.000
5	05	2	1.03		Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota		4%	3.883.574.474			5%	3.021.400.000
5	05	2	1.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	274.999.816	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	250.000.000
5	05	2	1.03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	171.178.134	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	250.000.000
5	05	2	1.03	3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	157.481.112	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	45.000.000
5	05	2	1.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Perkebunan dan Pangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	295.999.877	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	325.000.000
5	05	2	1.03	5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	273.000.020	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	271.400.000
5	05	2	1.03	6	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	270.999.619	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	325.000.000

5	05	2	1.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	938.780.180	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	250.000.000
5	05	2	1.03	8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	239.999.506	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	250.000.000
5	05	2	1.03	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	280.999.805	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	250.000.000
5	05	2	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	285.999.835	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	260.000.000
5	05	2	1.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	279.999.820	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	250.000.000
5	05	2	1.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	276.499.920	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	250.000.000
5	05	2	1.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	137.636.830	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Dokumen	45.000.000
5	05	2	1.04		Kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota		11%	5.893.731.045			12%	3.798.800.000
5	05	2	1.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	3 Dokumen	4.086.569.328	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	3 Dokumen	1.200.000.000

5	05	2	1.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	199.966.044	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	2 Laporan	548.800.000
5	05	2	1.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	3 Laporan	1.156.939.335	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	3 Laporan	1.450.000.000
5	05	2	1.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	3 Laporan	299.984.020	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	3 Laporan	400.000.000
5	05	2	1.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	150.272.318	APBD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kab/Desa	1 Laporan	200.000.000
5	05	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat		84 Indeks	22.247.017.817			85 Indeks	24.874.400.000
5	05					Nilai SAKIP Balitbangda		77,50 (BB)				78,10 (BB)	
5	05	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		85%	503.861.312			90%	487.500.000
5	05	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	10 Dokumen	426.378.000	APBD	Samarinda	10 Dokumen	65.000.000
5	05	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Samarinda	1 Dokumen	4.799.828	APBD	Samarinda	1 Dokumen	65.000.000
5	05	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Samarinda	1 Dokumen	4.799.828	APBD	Samarinda	1 Dokumen	65.000.000

5	05	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Samarinda	1 Dokumen	3.941.828	APBD	Samarinda	1 Dokumen	65.000.000
5	05	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Samarinda	1 Dokumen	3.941.828	APBD	Samarinda	1 Dokumen	65.000.000
5	05	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Samarinda	21 Laporan	53.192.000	APBD	Samarinda	21 Laporan	97.500.000
5	05	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	5 Laporan	6.808.000	APBD	Samarinda	5 Laporan	65.000.000
5	05	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan		0,08%	14.437.110.826			0%	11.394.900.000
5	05	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	50 Orang/Bulan	14.155.477.402	APBD	Samarinda	50 Orang/Bulan	11.000.000.000
5	05	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	12 Dokumen	242.040.000	APBD	Samarinda	12 Dokumen	300.000.000
5	05	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	1 Dokumen	723.000	APBD	Samarinda	1 Dokumen	13.000.000
5	05	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Samarinda	1 Dokumen	29.979.500	APBD	Samarinda	1 Dokumen	13.000.000
5	05	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Samarinda	1 Dokumen	3.894.000	APBD	Samarinda	1 Dokumen	3.900.000
5	05	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	30 Laporan	4.996.924	APBD	Samarinda	30 laporan	65.000.000

5	05	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah		15%	33.910.000			10%	31.000.000
5	05	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	1 Dokumen	2.600.000	APBD	Samarinda	1 Dokumen	4.000.000
5	05	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	1 Dokumen	2.600.000	APBD	Samarinda	1 Dokumen	4.000.000
5	05	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	-	-	APBD	Samarinda	1 Laporan	4.000.000
5	05	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	12 Laporan	26.110.000	APBD	Samarinda	12 Laporan	4.000.000
5	05	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	12 Laporan	2.600.000	APBD	Samarinda	12 Laporan	15.000.000
5	05	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan		50%	219.900.000			70%	430.000.000
5	05	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Samarinda	1 Paket	70.720.000	APBD	Samarinda	2 Paket	160.000.000
5	05	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	1 Dokumen	11.180.000	APBD	Samarinda	1 Dokumen	10.000.000
5	05	1	1.05	6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Samarinda	30 Orang	90.000.000	APBD	Samarinda	35 Orang	200.000.000
5	05	1	1.05	7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	30 Orang/Bulan	48.000.000	APBD	Samarinda	30 Orang/Bulan	60.000.000
5	05	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan umum berbasis elektronik		85%	3.314.980.062			95%	4.512.000.000
5	05	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	41.528.741	APBD	Samarinda	1 paket	100.000.000

5	05	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	646.128.495	APBD	Samarinda	1 Paket	150.000.000
5	05	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	58.024.876	APBD	Samarinda	1 Paket	26.000.000
5	05	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	100.479.500	APBD	Samarinda	1 paket	39.000.000
5	05	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	118.707.100	APBD	Samarinda	1 paket	117.000.000
5	05	1	1.06	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Samarinda	1 Laporan	100.000.000	APBD	Samarinda	1 Laoran	104.000.000
5	05	1	1.06	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	12 laporan	2.201.711.350	APBD	Samarinda	12 Laporan	3.700.000.000
5	05	1	1.06	8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Samarinda	1 Dokumen	31.400.000	APBD	Samarinda	1 Dokumen	26.000.000
5	05	1	1.06	9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	2 Dokumen	17.000.000	APBD	Samarinda	2 Dokumen	250.000.000
5	05	1	1.07		kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi		70%	430.949.714			100%	2.155.000.000
5	05	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Samarinda	-	-	APBD	Samarinda	0 Unit	-
5	05	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Samarinda	1 Unit	376.200.000	APBD	Samarinda	1 Unit	1.300.000
5	05	1	1.07	3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Samarinda	1 paket	52.143.840	APBD	Samarinda	1 Paket	458.700.000
5	05	1	1.07	4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Samarinda	10 Unit	5.874	APBD	Samarinda	12 Unit	1.500.000.000
5	05	1	1.07	5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Samarinda	1 Unit	2.600.000	APBD	Samarinda	0 Unit	-

5	05	1	1.07	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Samarinda	-	-	APBD	Samarinda	1 Unit	130.000.000
5	05	1	1.07	7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Samarinda	-	-	APBD	Samarinda	1 Unit	65.000.000
5	05	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi		100%	2.529.298.905			100%	3.537.000.000
5	05	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	12 Laporan	15.000.000	APBD	Samarinda	12 Laporan	39.000.000
5	05	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	560.241.705	APBD	Samarinda	12 Laporan	520.000.000
5	05	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	12 Laporan	390.412.800	APBD	Samarinda	12 Laporan	78.000.000
5	05	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	35 Laporan	1.563.644.400	APBD	Samarinda	35 Laporan	2.900.000.000
5	05	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik		70%	777.006.998			80%	2.327.000.000
5	05	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	6 Unit	152.087.998	APBD	Samarinda	6 Unit	210.000.000
5	05	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	6 Unit	198.655.000	APBD	Samarinda	6 Unit	150.000.000
5	05	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Samarinda	80 Unit	49.302.000	APBD	Samarinda	90 Unit	250.000.000

5	05	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Samarinda	1 unit	44.400.000	APBD	Samarinda	1 unit	1.000.000.000
5	05	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	4 Unit	233.772.000	APBD	Samarinda	6 Unit	600.000.000
5	05	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	3 Unit	10.150.000	APBD	Samarinda	3 Unit	52.000.000
5	05	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Samarinda	2 Unit	88.640.000	APBD	Samarinda	2 Unit	65.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025 telah disesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdiri dari 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 76 (tujuh puluh enam) sub kegiatan. Total pendanaan sebesar Rp. 35.918.200.000,- terdiri dari program penelitian dan pengembangan daerah Rp. 13.671.182.183,- program penunjang urusan pemerintahan daerah Rp. 22.247.017.817,-.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tersebut kemudian disesuaikan dengan pemutakhiran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, yang terlampir pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						35.918.200.000,00							34.776.910.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN						35.918.200.000,00							34.776.910.000,00	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						35.918.200.000,00							34.776.910.000,00	
1,	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Balitbangda	85 Indeks 78,10 Nilai/ Predikat		84 Indeks 77,50 Nilai/ Predikat	84 Indeks 77,50 Nilai/ Predikat	22.247.017.817,00						85 Indeks 78,10 Nilai/ Predikat	24.675.400.000,00	
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	90 Persen 90 %	-	80%	85 %	503.861.312,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	90 Persen 90 %	487.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	31 Dokumen	11 Dokumen	10 Dokumen	426.378.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	10 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	4.799.828,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	1 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	4.799.828,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	1 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	3.941.828,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	1 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	3.941.828,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	1 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63 Laporan	24 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	53.192.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	21 Laporan	97.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	-	5 Laporan	5 Laporan	6.808.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	5 Laporan	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0%	-	0.18%	0.08 %	14.437.110.826,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	0%	11.394.900.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	46 orang/bulan	41 Orang/ Bulan	69 Orang/ Bulan	14.155.477.402,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	50 Orang/ Bulan	11.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	242.040.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	12 Dokumen	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	723.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	1 Dokumen	13.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	29.979.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	1 Dokumen	13.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	3.894.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	1 Dokumen	3.900.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	90 Laporan	-	30 Laporan	30 Laporan	4.996.924,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	30 Laporan	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunya Temuan Audit Barang Milik Daerah	10%	-	20%	15 %	33.910.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	10%	27.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	1 Dokumen	4.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	1 Dokumen	4.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	26.110.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	12 Laporan	4.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	2.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	12 Laporan	15.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	70 % 70 Persen	-	40%	50 %	219.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	70 % 70 Persen	430.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	-	2 Paket	1 Paket	70.720.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	2 Paket	160.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	11.180.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	90 Orang	47 orang	25 orang	30 Orang	90.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	35 Orang	200.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	90 Orang	-	30 Orang	30 Orang	48.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	30 Orang	60.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik</i>	95 %	-	75%	85 %	3.314.980.062,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	95 % 95 Persen	4.512.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	41.528.741,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	-	1 Paket	100.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	646.128.495,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	1 Paket	150.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	58.024.876,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	1 Paket	26.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100.479.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	1 Paket	39.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	118.707.100,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	1 Paket	117.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	1 Laporan	104.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	2.201.711.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	12 Laporan	3.700.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	31.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	1 Dokumen	26.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	6 Dokumen	-	2 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	2 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi</i>	100 % 100 Persen	100%	30%	70 %	430.949.714,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	100 % 100 Persen	1.960.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	3 Unit	-	1 Unit	1 Unit	376.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	1 Unit	1.300.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	3 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	52.143.840,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	1 Paket	458.700.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	-	5 Unit	10 Unit	5.874,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	12 Unit	1.500.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	2.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN BALITBANGDA	0 Unit	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 Persen 100 %	-	100 %	100 %	2.529.298.905,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	100 Persen 100 %	3.537.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	12 Laporan	39.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	560.241.705,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	12 Laporan	520.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	390.412.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	12 Laporan	78.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	83 Laporan	31 Laporan	13 Laporan	35 Laporan	1.563.644.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	35 Laporan	2.900.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	80 Persen 80 %	100%	60%	70 %	777.006.998,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	80 Persen 80 %	2.327.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	-	2 Unit	6 Unit	152.087.998,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	6 Unit	210.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	9 Unit	6 Unit	6 Unit	198.655.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	6 Unit	150.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	61 Unit	70 Unit	80 Unit	49.302.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	90 Unit	250.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	44.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	1 Unit	1.000.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2 Unit	2 Unit	4 Unit	233.772.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	6 Unit	600.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	10.150.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	3 Unit	52.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	88.640.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN Balitbangda	2 Unit	65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	18 %	-	4%	9 %	13.671.182.183,00						18 %	10.101.510.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Presentase Hasil Inovasi yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	18 %	-	4%	9 %							18 %		
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	5%	-	2%	4 %	2.277.506.894,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholders	5%	1.356.780.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	3 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	860.519.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholders	1 Laporan	228.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	489.300.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholders	2 Laporan	228.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	3 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	183.081.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholders	1 Laporan	1.690.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi</i>	4 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	184.307.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholders	1 Laporan	185.900.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa</i>	3 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	245.229.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholders	1 Laporan	397.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			<i>Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola</i>	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	105.153.274,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholders	1 Dokumen	1.690.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan														
			<i>Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan</i>	14 Rekomendasi	-	4 Rekomendasi	2 Rekomendasi	209.917.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholders	5 Rekomendasi	313.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota</i>	5 %	-	2%	4 %	1.616.369.770,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	5 %	1.924.530.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>	3 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	317.772.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	499.250.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	266.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	314.690.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan</i>	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	284.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	2 Dokumen	433.900.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</i>	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	253.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	290.250.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja</i>	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	257.787.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	384.750.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5.05.02.1.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</i>	3 Dokumen	-	-	1 Dokumen	236.516.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	1.690.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota</i>	5 %	-	2%	4 %	3.883.574.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	5 %	3.021.400.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	274.999.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	171.178.134,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah</i>	3 Dokumen	-	-	1 Dokumen	157.481.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	45.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	295.999.877,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	325.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan</i>	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	273.000.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	271.400.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral</i>	3 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	270.999.619,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	325.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</i>	3 Dokumen	-	2 Dokumen	1 Dokumen	938.780.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan</i>	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	239.999.506,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	280.999.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	285.999.835,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	260.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	279.999.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	276.499.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	137.636.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	ASN dan Stakeholder	1 Dokumen	45.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	12%	-	11%	11 %	5.893.731.045,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Akademisi, Pelaku Bisnis, Pemerintah Daerah, Masyarakat	12%	3.798.800.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	8 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4.086.569.328,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Akademisi, Pelaku Bisnis, Pemerintah Daerah, Masyarakat	3 Dokumen	1.200.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	199.966.044,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Akademisi, Pelaku Bisnis, Pemerintah Daerah, Masyarakat	2 Laporan	548.800.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	9 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.156.939.335,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Akademisi, Pelaku Bisnis, Pemerintah Daerah, Masyarakat	3 Laporan	1.450.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	9 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	299.984.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Akademisi, Pelaku Bisnis, Pemerintah Daerah, Masyarakat	3 Laporan	400.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	150.272.318,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Akademisi, Pelaku Bisnis, Pemerintah Daerah, Masyarakat	1 Laporan	200.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
J U M L A H							35.918.200.000,00								
														34.776.910.000,00	

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



AKMAL MALIK
NIP. 19690512 198903 2 009